

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011). *Skripsi*. Universitas Pasundan. Bandung.
- Brodjonegoro, B. 2009. Fiscal Decentralization and Its Impact on Regional Economic Development and Fiscal Sustainability. Dalam *Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia*. Editor C. J. G. Holtzappel dan M. Ramstedt. Institute of Southeast Asian Studies. Singapura.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*. 26-28 Juli 2007: 1-25.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Hardjowiryono, Marwanto. 2012. Development of Indonesia's Intergovernmental Financing System. Dalam *Fiscal Decentralization in Indonesia a Decade after Big Bang*. Editor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. University of Indonesia Press. Jakarta.
- Kasim, J.S. 2012. *Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan*. Pustaka Spirit. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008. Dalam *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Editor A. Abimanyu dan A. Megantara. Kompas. Jakarta.
- Marlowe, J., W. C. Rivenbark, dan A. J. Vogt. 2009. *Capital Budgeting and Finance: A Guide for Local Government*. 2nd ed. ICMA. Washington D. C.
- Mulyono, S. 2006. *Statistika untuk Ekonomi & Bisnis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Oktriniatmaja, R. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. *Tesis*. Program S2 Manajemen Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2008 *Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor*

- 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.* 22 Juli 2008. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 *Bagan Akun Standar.* 30 Agustus 2007. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 *Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.* 2 Juni 2008. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.* 13 Februari 2009. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 *Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 25 Januari 2010. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 *Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.* 3 Juli 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 677. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 *Pengalokasian Anggaran Transfrer ke Daerah.* 1 November 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1278. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 *Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.* 13 Desember 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1469. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.* 27 April 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.* 16 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan.* 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 *Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 7 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pevcin, P. 2011. Flypaper Effect in Slovenian Municipal Finances. *HKJU – CCPA, god. 11. (2011.), br. 3., str. 707-728*.
- Rahmawati, N. I. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sarundajang, S.H. 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sour, L. The Flypaper Effect in Mexican Local Governments. *Estudios Economicos* 28(1): 165-186.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Supranto, J. dan N. Limakrisna. 2012. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 *Pemerintahan Aceh*. 1 Agustus 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. 15 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 28 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 1(3): 44-51.

- Hadisaputra, M.T. 2012. *Belanja Barang & Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan BMN*. Diakses 20 Januari 2013. <http://mengelolaperbendaharaan.blogspot.com/2012/08/belanja-barang-belanja-modal-dalam.html?showComment=1390212031888#c6646073592399242714>.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Flypaper_effect. Diakses 11 Februari 2014.
- Mudjisantosa. 2012. *Belanja Barang & Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara dengan Dana DIPA*. Diakses 20 Januari 2013. <http://www.mudjisantosa.net/2012/07/belanja-barang-dan-belanja-modal.html?showComment=1389868148767#c7142648676535139330>.